

PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PRODI NAUTIKA MENGACU PADA STANDAR IMO DAN STCW

Iwan Mahendro

Program Studi Nautika, STIMART “AMNI” Semarang
Jl. Soekarno Hatta 180 Semarang 50199
E-Mail : iwanmahendro@stimart-amni.ac.id

Abstract

Every college must have a curriculum that aims to produce graduates who can compete in the world of work. In the maritime world, seafarers from graduates produced by universities in Indonesia in the maritime field are considered still unable to compete with seafarers from abroad. This is because seafarers from Indonesia do not have good knowledge and skills. For this reason, there is a need for Indonesian seamen to compete with foreign seafarers. One way is to implement a curriculum that already exists in universities to be able to refer to the IMO and STCW standards. Universities that have implemented curricula that refer to IMO and STCW standards, the graduates can be recognized internationally and can compete with seafarers from other countries. Because IMO and STCW are rules that have been recognized internationally.

Keywords: curriculum, Nautika, IMO, STCW

Abstrak

Setiap perguruan tinggi pastinya mempunyai kurikulum yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing di dunia kerja. Di dalam dunia maritim, pelaut dari lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi di Indonesia dibidang maritim dianggap masih belum mampu bersaing dengan pelaut dari luar negeri. Hal ini karena pelaut dari Indonesia belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang baik. Untuk itu perlu adanya cara agar pelaut Indonesia agar dapat bersaing dengan pelaut asing. Salah satu cara adalah dengan menerapkan kurikulum yang sudah ada di perguruan tinggi agar dapat mengacu pada standar IMO dan STCW.

Perguruan tinggi yang sudah menerapkan kurikulum yang mengacu pada standar IMO dan STCW maka lulusannya sudah bisa diakui secara internasional dan dapat bersaing dengan pelaut dari negara lain. Karena IMO dan STCW merupakan suatu aturan yang sudah diakui secara internasional.

Kata Kunci : kurikulum, Nautika, IMO, STCW

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim hal ini dapat dilihat dari banyaknya pulau yang saling terhubung oleh perairan, dengan luasnya laut menjadikan perairan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Banyak kapal – kapal dari berbagai negara melewati perairan Indonesia karena salah satu penyebabnya adalah letak geografis Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudra. Untuk itu pemerintah Indonesia harus bisa memanfaatkan kondisi ini, salah satunya caranya dengan berupaya agar Indonesia menjadi poros maritim dunia. Hal ini sangatlah dimungkinkan karena Indonesia dianggap mempunyai sumber daya maritim yang banyak.

Sumber daya maritim yang ada saat ini masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh sumber daya maritim yang belum optimal yaitu pelaut – pelaut dari Indonesia dilihat dari pengetahuan dan keterampilan tentang maritim dianggap masih kalah dibandingkan dengan pelaut – pelaut dengan negara lain. Padahal Indonesia sudah memiliki perguruan tinggi di bidang maritim yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, selain itu jumlah lulusan dari perguruan tinggi dibidang maritim dianggap masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan di dunia maritim.

Pelaut – pelaut yang diluluskan dari perguruan tinggi agar dapat bersaing dengan pelaut asing baik dari pengetahuan dan keterampilan dibidang maritim maka perlu dibuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja bidang maritim. Caranya adalah dengan membuat kurikulum yang mengacu IMO. IMO (*Internasional Maritime Organization*) merupakan suatu badan internasional yang khusus menangani masalah – masalah kemaritiman. Tugas utama dari IMO adalah membuat peraturan – peraturan tentang keselamatan kerja di laut termasuk keselamatan pelayaran dan pencegahan, serta penanggulangan pencemaran lingkungan.

Kurikulum yang digunakan selain mengacu pada IMO juga harus mengacu pada STCW 1995 yang saat ini sudah di amandemen STCW tahun 2010. STCW (*Standard of Training, Certification and Watchkeeping*) merupakan persyaratan minimum pelatihan dan sertifikat yang harus dimiliki seorang pelaut. Jika seorang pelaut tidak mempunyai sertifikat STCW maka dipastikan tidak akan diberikan ijin untuk berlayar.

Perguruan tinggi dibidang maritim yang menggunakan kurikulum yang mengacu standar IMO dan SCTW maka dapat dipastikan lulusannya akan mempunyai kemampuan yang sudah diakui secara internasional. Oleh karena itu sudah semestinya setiap sekolah tinggi dibidang maritim saat ini yang menggunakan kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini yaitu dengan cara menyesuaikan kurikulum KBK yang mengacu pada Standar IMO dan STCW agar lulusannya dapat bersaing dengan pelaut – pelaut dari luar negeri.

Rumusan Masalah

Pelaut – pelaut dari Indonesia yang dihasilkan dari lulusan perguruan tinggi maritim saat masih dianggap kalah bersaing dengan pelaut – pelaut dari negara lain, untuk itu perlu dibuat suatu kurikulum yang dapat menghasilkan pelaut yang diakui secara internasional. Rumusan masalah pada artikel ini adalah bagaimana penerapan kurikulum KBK yang mengacu pada standar IMO dan STCW?

Pembahasan

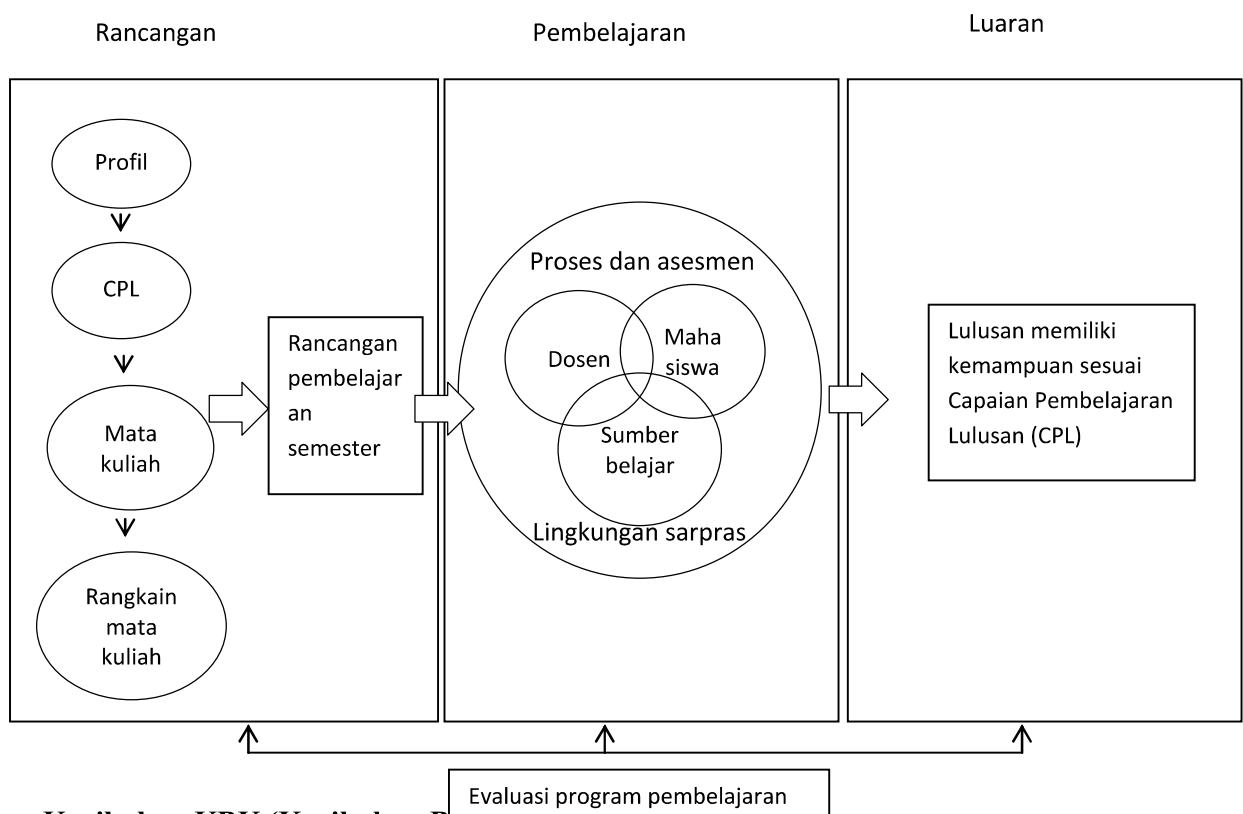
Kurikulum

Kurikulum adalah suatu rencana pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Harsono (2005) kurikulum adalah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional.

Kurikulum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pembentukan karakter seseorang. Menurut Nurgiyantoro (1988), kurikulum mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi yang pertama bagi sekolah terdiri dari alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi yang kedua kurikulum dapat mengontrol dan memelihara keseimbangan proses pendidikan. Dan yang ketiga fungsi kurikulum untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat ataupun lapangan pekerjaan sehingga kurikulum mencerminkan hal – hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang baik harus terdapat beberapa komponen yang harus ada. Menurut Oemar Hamalik (2001) komponen dari kurikulum yaitu tujuan, komponen materi kurikulum, komponen metode, organisasi kurikulum,

dan evaluasi. Tujuan dari kurikulum yaitu kurikulum yang dibuat harus mengacu pada sesuatu yang akan dicapai. Jadi harus ada kepastian dalam dalam jangka waktu berapa lama tujuan akan tercapai. Kemudian komponen materi kurikulum berisi tentang bahan pelajaran, materi yang mengacu dalam pencapaian, dan materi yang mengacu pencapaian tujuan pendidikan nasional. Komponen yang berikutnya yaitu komponen metode, maksudnya metode atau cara pengajar dalam menyampaikan materi kepada anak didik. Metode pengajaran sangat menentukan suatu keberhasilan suatu proses belajar mengajar. Komponen kurikulum selanjutnya adalah organisasi kurikulum, maksudnya suatu bentuk pengelompokkan mata pelajaran ataupun mata kuliah untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dan komponen kurikulum yang terakhir yaitu evaluasi, hasil dari pembelajaran akan akan dinilai ataupun dilakukan proses pengoreksian tentang keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran.

Kurikulum dapat diskemakan sebagai berikut.



Kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis kompetensi)

Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia harus bisa menghasilkan lulusan yang dapat bersaing didunia kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Agar

dapat menghasilkan lulusan yang dapat bersaing maka salah satu caranya adalah dengan menggunakan kurikulum KBK. Implementasi dari KBK seharusnya sudah terlaksana di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia, namun pada kenyataannya masih ada perguruan tinggi yang belum menerapkan KBK sesuai dengan kependidikan No.232/U/2000 dan No.045/U/2002 karena adanya kendala yang dihadapi oleh setiap perguruan tinggi. Kendala yang dihadapi yaitu masih beragamnya pemahaman tentang makna KBK serta penerapannya dalam pembelajaran.

Penerapan kurikulum KBK memungkinkan para pengajar menilai hasil belajar anak didiknya dalam hal pemahaman dan penguasaan materi yang dipelajarinya. Kurikulum KBK dalam pengembangannya memperhatikan berbagai hal, antara lain : (1) keimanan, penguatan integritas nasional yang dicapai melalui pendidikan, (2) keseimbangan berbagai bentuk pengalaman belajar anak didik yang meliputi etika, logika, estetika, dan kinestetika. Penggunaan kurikulum KBK bukan tanpa alasan, karena kurikulum KBK mempunyai karakteristik yang unggul. Karakteristik itu yaitu : menekankan pada ketercapaian kompetensi anak didik secara individual, berorientasi pada hasil belajar, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya pengajar tetapi ada sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif, dan penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya pencapaian suatu kompetensi.

Pemerintah berupaya agar menyamakan tentang pemahaman tentang KBK setiap perguruan tinggi dengan cara melakukan kualifikasi lulusan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Pemerintah menerbitkan Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. Dengan adanya KKNI ini maka diharapkan dapat mengubah melihat kompetensi seorang lulusan tidak hanya dilihat dari ijazah tetapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang telah disepakati secara nasional.

Kurikulum KBK yang sudah digunakan oleh perguruan tinggi sekarang ini harus mengacu kepada KKNI agar dapat dihasilkan lulusan yang mempunyai kualitas yang kompeten dibidangnya. Setiap perguruan tinggi harus mempunyai kurikulum yang mengacu pada KKNI karena dengan KKNI perguruan tinggi dapat memperjelas profil kelulusannya, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

IMO

IMO merupakan suatu badan khusus PBB yang khusus menangani berbagai masalah kemaritiman. Dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958, mulai diberlakukan pada tanggal 17 Maret 1958. Pada awalnya pembentukan badan ini bernama IMCO (*Inter-Governmental Maritime Consultative Organization*), perubahan dari IMCO menjadi IMO diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1982. Struktur organisasi IMO terdiri dari *Assembly* (Majelis), *Council* (Dewan), dan 5 *Committee* (Komite).

Assembly merupakan lembaga tertinggi di IMO, dengan jumlah anggota IMO mencapai 168 negara. Tugas dan tanggung jawab *Assembly* yaitu menentukan program kerja, voting anggaran, dan menentukan keuangan dalam organisasi. Selain itu *Assembly* juga bertugas melaksanakan pemilihan anggota dewan (*Council*). *Council* mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain : mengkoordinasikan kegiatan badan – badan IMO yang lain, memperhatikan rancangan anggaran dan program kerja yang akan disampaikan di sidang *Assembly*, menerima berbagai laporan dan usulan dari *Committee* untuk diteruskan ke *Assembly* dengan tambahan beberapa rekomendasi. 5 *Committee* yang ada dalam IMO yaitu *Maritime Safety Committee* (MSC), *Marine Environment Protection Committee* (MEPC), *Legal Committee* (LEG), *Technical Co-operation Committee* (TCC), dan *Facilitation Committee* (FAL). Tugas dan tanggung jawab dari *Committee* antara lain: membuat rancangan ketentuan mengenai pepadatan dan transportasi muatan cair dan gas secara curah dengan menggunakan kapal – kapal laut, termasuk bahan – bahan kimia dan cairan untuk penanganan polusi laut. Membuat rancangan – rancangan ketentuan mengenai pencegahan di kapal. Membuat rancangan – rancangan ketentuan mengenai alat bantu navigasi serta aturan pencegahan tubrukan di laut.

STCW (*The Standards of Training, Certification & Watchkeeping*)

STCW adalah sebuah kebijakan dari hasil konvensi internasional yang draftnya dibuat tahun 1978 dan disempurnakan kembali tahun 1995. Kebijakan ini mengharuskan para pelaut mempunyai keahlian dan sertifikasi tertentu sesuai dengan penempatan tugasnya sebagai *Deck Officers* atau *Engine Officers*. Keahlian dan sertifikasi yang harus dimiliki *Deck Officers* yaitu *Basic Safety Training* (BST), *Bridge Resource*

Management (BRM), dan *Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (PSC)*. Untuk keahlian dan sertifikasi *Engine Officers* yaitu *Basic Safety Training (BST)* dan *Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (PSC)*.

Basic Safety Training (BST) adalah kursus yang terdiri dari *Basic FireFighting*, *Personal Survival*, *Personal Safety and Social Responsibility*, dan *Elementary First Aid*. Kursus ini diadakan selama 5 hari dan pelaut harus memperbarui sertifikasi ini setiap 5 tahun sekali. *Bridge Resource Management (BRM)* adalah kursus yang mempelajari cara melakukan pekerjaan sebagai anggota tim *Deck Officer* dimana setiap anggota tim harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja. Kursus ini dilaksanakan selama 3 hari. *Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (PSC)* adalah sebuah kursus yang hanya diwajibkan untuk *Deck Officer* yang tidak mempunyai *AB-Unlimited*, *AB-Limited*, *AB-special* atau *lifeboatman*.

Pada pertengahan tahun 2010 di Manila, IMO mengadakan konferensi untuk membahas amandemen STCW yang dikenal dengan Amandemen Manila. Amandemen ini mempunyai tujuan untuk membuat STCW selalu mengikuti perkembangan jaman. Dalam amandemen manila terdapat beberapa perbaikan yaitu : (1) Sertifikat Kompetensi & *Endorsement*-nya hanya boleh dikeluarkan oleh Pemerintah sehingga mengurangi kemungkinan pemalsuan sertifikat kompetensi. (2) Pelaut yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai Standar medis umum untuk pelaut dari satu negara dapat berlaku di kapal yang berasal dari negara lain tanpa menjalani pemeriksaan medis ulang. (3) Persyaratan revalidasi sertifikat dirasionalisasi untuk kepentingan pelaut. (4) Pengenalan metodologi pelatihan modern seperti pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran berbasis *web*. (5) Jam istirahat bagi pelaut dikapal diselaraskan dengan persyaratan *Maritime Labor Convention ILO/MLC (Konvensi Buruh Maritim ILO) 2006*, dengan maksud untuk mengurangi kelelahan. (6) Memperkenalkan persyaratan-persyaratan tambahan untuk menghindari alkohol dan penyalahgunaan zat terlarang. (7) Kompetensi dan kurikulum baru harus terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi modern dan kebutuhan riil dilapangan. (8) Pelatihan penyegaran dibahas dengan layak dalam konvensi.

Nautika

Program studi nautika mempunyai tujuan secara umum untuk melatih lulusan dari sekolah tinggi menjadi perwira pelayar besar (Samudra) dibidang keahlian Nautika. Perwira yang diluluskan mempunyai tugas dan tanggung jawab agar dapat membawa kapal penumpang maupun muatannya dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan aman dan selamat. Lulusan dari prodi nautika akan mendapat ijazah akademik dengan gelar A.Md (Ahli Madya) dan ijazah profesi dengan gelar ANT III (Ahli Nautika Tingkat III). Masa studi prodi nautika yaitu 6 semester yang terdiri dari semester I sampai IV berupa kuliah teori dan praktikum laboratorium di darat. Semester V dan VI berupa praktek berlayar di kapal untuk pelayaran dalam dan luar negeri. Untuk bisa mengikuti praktek maka harus mengikuti berbagai diklat yaitu BST, PSCRB, TF, Deck Watchkeeping, Buku pelaut syahbandar, dan paspor bagi berlayar ke luar negeri.

Penerapan Kurikulum KBK yang Mengacu pada IMO dan STCW

Perguruan tinggi mempunyai visi agar lulusannya dapat bersaing dturi dunia kerja, baik itu persaingan dalam negeri maupun persaingan di luar negeri. Untuk itu setiap perguruan tinggi sudah menyiapkan kurikulum yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Pemerintah sudah mengatur kurikulum yang akan digunakan oleh setiap perguruan tinggi agar dapat bersaing dan bekerja dengan baik sesuai bidangnya masing –masing.

Pemerintah sudah menjelaskan tentang kurikulum dalam permendiknas No.232/U/2000, dimana khusus untuk lulusan diploma 3 ada pembagian kategori matakuliah yang bertujuan untuk memudahkan anak didik dalam belajar. Dengan berdasarkan permendiknas tersebut maka perguruan tinggi dibidang maritim khususnya program studi nautika sudah menyiapkan kurikulum yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang akan digunakan juga dibuat berdasarkan kategori matakuliah yaitu MPK (Matakuliah Pengembangan Kepribadian), MKK (Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan), MKB (Matakuliah Keahlian Berkarya), MPB (Matakuliah Perilaku Berkarya), dan MBB (Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat).

MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi perkerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Contoh matakuliah pada program studi nautika yaitu

Agama, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. MKK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membuat landasan penguasaan ilmu dan keterampilan terstruktur. Contoh matakuliah pada program studi nautika adalah Bahasa Inggris Maritim, Matematika Terapan, Astronomi.

MKB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. Contoh matakuliah adalah Sistem Transportasi. MPB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut bakat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. Contohnya matakuliah yaitu Kewirausahaan. MBB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dan berkarya. Contoh matakuliah yaitu Dinas Jaga, Hukum Maritim, Pencegahan Polusi.

Sesuai standar IMO dan STCW setiap lulusan dari perguruan tinggi maritim harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh IMO dan STCW agar mendapat ijin untuk berlayar. Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut harus mengikuti berbagai diklat yang ditentukan. Diklat yang harus diikuti yaitu BST lama diklat 9 hari, SCRB lama diklat 4 hari, AFF lama diklat 4 hari, MFA lama diklat 3 hari, SAT lama diklat 1 hari, SDS lama diklat 2 hari, BOCT lama diklat 6 hari, BLGT lama diklat 5 hari, MC lama diklat 5 hari, SSD lama diklat 3 hari, Radar lama diklat 6 hari, ARPA lama diklat 4 hari, GMDSS lama diklat 14 hari, CCM lama diklat 3 hari, ECDIS lama diklat 5 hari, BRM lama diklat 5 hari, ERM lama diklat 4 hari, FRB lama diklat 4 hari, AOT lama diklat 8 hari, ALGT lama diklat 8 hari, ACT lama diklat 8 hari, dan IMDG CODE lama diklat 5 hari.

Tujuan diadakannya diklat yaitu untuk mendidik dan melatih para peserta diklat agar memiliki kompetensi sebagai perwira navigasi di daerah pelayaran nusantara, penanganan dan pengaturan muatan serta pengendalian operasi kapal dan menjadi nahkoda untuk kapal < 500 GT NCV (Near Coastal Voyage).

Perguruan tinggi sebelum melaksanakan awal perkuliahan maka sudah seharusnya membuat jadwal perkuliahan yang akan digunakan. Mengacu pada IMO dan STCW yang mengharuskan setiap pelaut mempunyai berbagai sertifikat keahlian pelaut maka perguruan tinggi harus membuat jadwal pelaksanaan diklat tidak berbenturan dengan

jadwal perkuliahan reguler. Dengan jadwal yang baik maka diharapkan setiap anak didik dapat mengikuti perkuliahan dan mengikuti semua diklat yang sudah ditetapkan. Jika anak didik tidak mengikuti satu kegiatan diklat maka akan berdampak pada tidak akan mendapat ijin berlayar. Untuk bisa mendapat ijin berlayar maka anak didik harus melengkapi sertifikat apa yang kurang atau yang belum diikuti, karena sertifikat yang dikeluarkan oleh IMO dan STCW berlaku secara internasional.

Simpulan

Dari pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaut yang dihasilkan dari lulusan perguruan tinggi masih dianggap kalah bersaing dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal kemaritiman untuk bisa mengatasi hal tersebut maka setiap perguruan tinggi sudah seharusnya menggunakan kurikulum yang ada agar dapat mengacu pada standar IMO dan STCW. Dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada standar IMO dan STCW maka pelaut yang dihasilkan dipastikan akan dapat bersaing dengan pelaut dari luar negeri. Karena IMO dan STCW merupakan suatu aturan yang sudah berstandar internasional, negara Indonesia juga merupakan anggota dari IMO maka sudah suatu keharusan agar perguruan tinggi dibidang maritim dapat menerapkan kurikulum yang mengacu pada standar IMO dan STCW.

Daftar Pustaka

- E. Mulyasa. 2005. Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Hamalik, Oemar. 2001. Proses Belajar Mengajar. Jakarta : Bumi Aksara.
- Harsono. 2005. Pengantar Problem-Based Learning. Medika. Yogyakarta : Fakultas Kedokteran UGM
- Nurgiyantoro. 1988. Dasar – Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah, Sebuah Pengantar Teoritis dan Pelaksana (Cetakan kedua 2008, cetakan pertama 1988). Yogyakarta : BPFE.
- Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- Kepmendiknas No. 232/U/2000